

# **KEBERPIHAKAN MEDIA MENJELANG PILPRES 2019**

**(Analisis Framing Pemberitaan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019-  
2024 Pada Surat Kabar Harian Kompas, Jawa Pos dan Republika Periode 10  
Agustus-16 Agustus 2018)**

## **NASKAH PUBLIKASI**

Disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Stata I

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh :

**Arief Rachman Hakim**

**20130530289**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Naskah Publikasi dengan Judul

**KEBERPIHAKAN MEDIA MENJELANG PILPRES 2019**

**(Analisis Framing Pemberitaan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019-  
2024 Pada Surat Kabar Harian Kompas, Jawa Pos dan Republika Periode 10  
Agustus-16 Agustus 2018)**

Oleh :

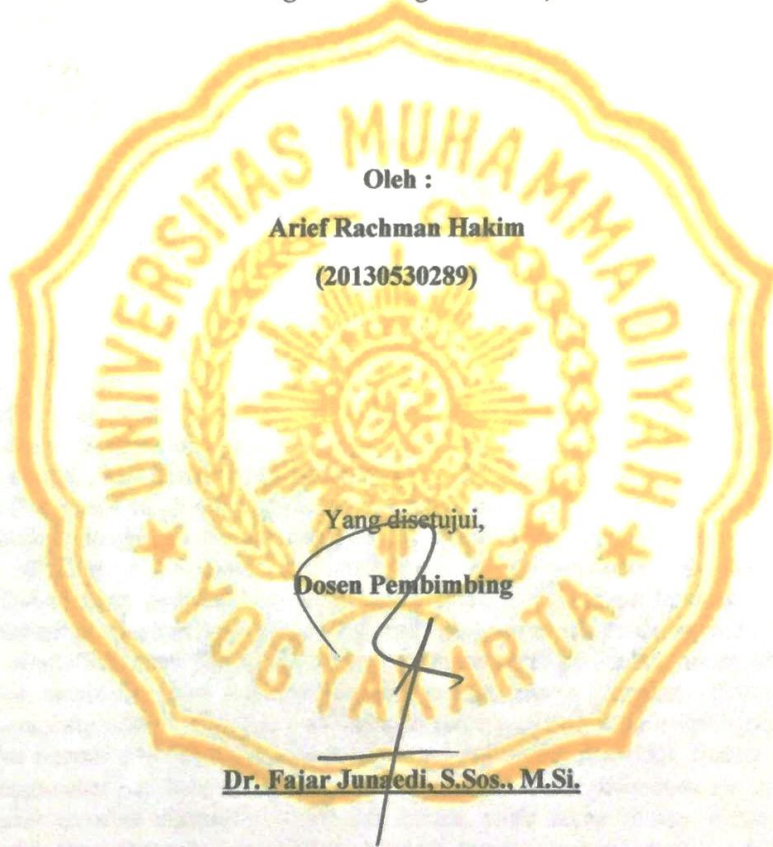
**Arief Rachman Hakim**

**(20130530289)**

Yang disetujui,

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Fajar Junardi, S.Sos., M.Si.**



# Keberpihakan Media Menjelang Pilpres 2019

Arief Rachman Hakim  
Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Broadcasting) UMY

## ABSTRAK

*The presidential election is certainly cannot be separated from the newspaper framing. Republika, Jawa Pos, and Kompas have different perspectives about the presidential election. This study aims to determine the impartiality of the news, the different perspectives regarding the 2019 presidential election, and to know the factors that influence these differences. The theoretical framework in this study includes constructionism in the mass media, news in the view of constructionism, framing analysis and framing factors of news. The research data is in the form of reporting on the Republika, Jawa Pos and Kompas among 10 to 16 August 2018 editions. The data was collected by documentation techniques and analyzed using framing analysis by William A. Gamson & Modigliani. The results of this study show partiality and differences in viewpoints. Republika emphasized on the preaching of the 2019 presidential election with an intense involvement of the ulama in the success of the candidate pairs. Then Jawa Pos emphasized on the drama between coalitions in determining the vice presidential figures, also included news about campaign rules and the spread of hoax news before the election. Kompas comes with a viewpoint that is almost the same as Jawa Pos but packaged in a more relaxed and non-frontal language, Kompas is also the only newspaper that raises the issue of the 2019 election coattails effect. The difference in the perspective of the newspaper is influenced by two factors, extra media level including the government and panellists, and ideological level..*

**Keywords:** *constructionism, framing analysis, 2019 presidential election*

Kontestasi pilpres sangat erat kaitannya dengan framing surat kabar. Republika, Jawa Pos, dan Kompas memandang dinamika pilpres tersebut melalui sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberpihakan pemberitaan pilpres 2019 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi konstruksionisme dalam media massa, berita dalam pandangan konstruksionisme, analisis framing dalam berita dan faktor-faktor pembingkai berita. Data penelitian berupa pemberitaan mengenai dinamika pilpres 2019 pada Republika, Jawa Pos dan Kompas edisi 10 – 16 Agustus 2018. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis framing model William A. Gamson & Modigliani. Hasil penelitian ini menunjukkan keberpihakan serta perbedaan sudut pandang antara ketiga koran tersebut. Republika menekankan pemberitaannya dengan memuat keterlibatan ulama dalam menyukkseskan paslon, Kemudian Jawa Pos memuat drama pada kedua koalisi dalam menentukan figur cawapres, selain itu Jawa Pos memuat pemberitaan aturan kampanye dan maraknya hoax menjelang pilpres. Kompas hadir dengan sudut pandang yang nyaris sama dengan Jawa Pos namun dikemas dengan bahasa yang lebih santai dan tidak frontal, Kompas juga mengangkat isu dampak ekor jas pemilu 2019. Adapun perbedaan sudut pandang surat kabar tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekstra media meliputi pemerintah dan narasumber, serta faktor ideologi dari ketiga surat kabar tersebut.

**Kata kunci :** *Konstruksionisme, Analisis framing, Pilpres 2019*

## PENDAHULUAN

Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah perhelatan politik nasional terbesar di Indonesia yang tentu tidak luput dari perhatian media. Dewasa ini, pemberitaan media dianggap mampu merepresentasikan realitas politik yang ada kepada masyarakat. Alfian dalam (Sutanto 2014 : 39) menjelaskan bahwa pemberitaan media terhadap konstelasi politik seperti layaknya aliran darah,

mengalirkan pesan-pesan politik berupa dukungan (aspirasi dan kepentingan), protes serta tuntutan yang pada akhirnya pesan politik yang sudah dikemas sedemikian rupa tersebut diterima oleh masyarakat (Sutanto 2014 : 39).

Nimmo (dalam Hamad, 2004 : 2) menjelaskan bahwa “komunikasi politik di media massa sangat erat kaitannya dengan opini publik mengenai suatu masalah politik atau aktor politik”. Dalam hal ini, media massa

menjadi penggerak utama dalam mempengaruhi individu terhadap terpaan berita yang diterimanya. Oleh karena itu, media massa dijadikan sebagai kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan berita/informasi politik. Salah satunya dengan menggunakan surat kabar (Cangara dalam Lubis, 2011 : 7).

Sebagai contoh, pada pilpres 2014 lalu, Jawa Pos adalah salah satu media cetak yang tidak ketinggalan dalam menyampaikan perkembangan informasi terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta terhadap pemberitaan pemilu periode 22 Maret – 5 April 2014 menunjukkan data bahwa porsi terbesar yang diberitakan oleh Jawa Pos adalah Partai Demokrat sebanyak 6 (9.68%) dengan kategori *hard lead* 4 item dan 2 *soft lead* 2 berita. Berita tentang partai non Demokrat secara keseluruhan mencapai 51 (82.26%) item, sedangkan topik lainnya sebanyak 5 (8.06%). Tentu hal ini selaras dengan posisi pemilik Jawa Pos Dahlan Iskan sebagai kandidat calon Presiden Partai Demokrat (Wicaksono dkk, 2015 : 19-20). Situasi seperti ini menandakan adanya bias pemberitaan karena bisa dimaknai sebagai ajang promosi dan pencitraan pemilik Jawa Pos.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih Kompas, Jawa Pos dan Republika sebagai objek penelitian. Kompas dan Jawa Pos adalah dua surat kabar yang paling banyak dibaca di seluruh Indonesia, terbukti dari peningkatan angka pembaca Kompas dari 17,2% menjadi 18,4% dan Jawa Pos dari 15,3% menjadi 16,2% di seluruh Indonesia (Kuncoro, 2013 : 227). Sedangkan Republika adalah koran berskala nasional berideologi islam yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap

pola pemberitaan yang berbau islami, tak terkecuali tentang isu politik seperti pilpres yang dalam pemberitaannya lebih menonjolkan sisi keagamaan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam (Romadhonita, 2014 : 283).

Ketiga koran tersebut juga memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai pilpres 2019. Sebagai contoh, pada pemberitaan edisi 10 Agustus 2018, surat kabar harian Kopas, Jawa Pos dan Republika juga memiliki framing yang berbeda perihal pilpres 2019 mendatang. Republika memframing peristiwa tersebut dengan memfokuskan pemberitaan pada figur cawapres dari kedua kubu dengan menghadirkan perangkat framing seperti (*Metaphors*) dan (*Exemplars*) yang terkesan memihak dan tidak berimbang. Republika menggambarkan duet Jokowi-Amin dengan (*Metaphors*) “Nasionalis Religius”. Disamping itu Republika memuat pemberitaan tentang Prabowo Amin dengan menulis (*Exemplars*) “dugaan kasus mahar politik Sandiaga Uno” dan Cuitan Andi arief yang mengatakan Prabowo (*Deiction*) “Jenderal Kardus”.

Sedangkan Jawa Pos dan Kompas lebih menyoroti peristiwa ini dari sisi politik kedua kubu. Jawa Pos memuat (*Depiction*) “drama kepentingan parpol pendukung dan kebutuhan logistik”, untuk menggambarkan proses politik dari kedua belah kubu. Kompas dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan Jawa Pos, yang membedakan adalah Kompas memaknai peristiwa ini sebagai suatu pelajaran kedepan bagi politikus, maupun pemerhati politik mengenai efek ekor jas dari pemilu serentak tersebut. Kompas memuat (*Depiction*) “Strategi para pemburu efek ekor jas” yang artinya,

panggung polpres 2019 juga menjadi ajang mencari keuntungan bagi parpol pendukung yang mengharapkan hubungan positif antara calon dan parpol pendukung, sehingga diharapkan figur capres-cawapres akan berdampak positif terhadap perolehan suara di pileg 2019.

Keberagaman media yang ada mengharuskan kita untuk membahas lebih lanjut keberpihakan pemberitaan media serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan framing berita dalam media. Hal ini penting dilakukan karena sikap pemberitaan media yang tidak sepenuhnya netral. Tentunya ini sebagai suatu yang kontradiktif mengingat media merupakan pilar keempat dalam demokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai anjing pengawas (*watchdog*) terhadap penyalahgunaan kekuasaan politik dan juga berfungsi sebagai korelasi sosial yang memandu publik menerjemahkan realitas berbangsa dan bernegara dalam bentuk informasi yang berimbang (Dhakidae dalam Jati, 2013 : 15).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis framing model William A. Gamson dan Modigliani. Dengan penelitian menggunakan analisis framing ini, peneliti dapat melihat bagaimana media mengkonstruksi sebuah fakta. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita (Eriyanto, 2002: 79). Data peneliti diperoleh dari dokumentasi Surat Kabar Harian Kompas, Jawa Pos dan Republika mengenai pemberitaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden periode 10 Agustus – 16 Agustus 2018. Setelah

data-data dikumpulkan, dilakukan proses analisis. Analisis data dilakukan dengan mencari gagasan utama dari pemberitaan tersebut lalu menguraikan perangkat framing yang digunakan untuk mendukung gagasan utama yang dibentuk oleh ketiga surat kabar harian tersebut.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Framing Republika: Figur Calon Wakil Presiden Menjadi Penentu**

Kehadiran sosok Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno di kursi panas cawapres pada kontestasi 2019 mendatang nampaknya menjadi warna tersendiri dalam pemberitaan Republika. Bagaimana tidak, berita dengan judul “Kandidat Siap Mendaftar” tersebut menjadi *headline* yang hampir memenuhi halaman utama. Pemberitaan Republika ini dilengkapi dengan (*Visual Image*) foto kedua pasangan calon yakni Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi. Uniknya, dibawah foto tersebut dimuat total harta kekayaan dan rekam jejak masing-masing cawapres.

Pemberitaan yang disajikan Republika terlihat memihak kepada cawapres Ma'ruf Amin. Hal tersebut dikuatkan dengan dimuatnya (*Metaphors*) “Nasionalis Religius” untuk menggambarkan duet antara Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pada halaman sembilan juga memuat berita dengan judul “Kiai Ma'ruf Prioritaskan Ekonomi Umat”. Dalam pemberitaan tersebut Republika memuat (*Roots*) bersumber dari Ma'ruf Amin yang mengatakan “aspek pertama adalah menjaga keutuhan bangsa. Sebab, kalau bangsa tidak bersatu, pembangunan tidak mungkin dilakukan”. Yang artinya, bahwa Jika Jokowi-Amin terpilih maka persatuan dan keutuhan bangsa adalah prioritas utama yang harus direalisasikan.

Ketika *Republika* memuat berita yang bernada positif terhadap Jokowi-Amin, beda halnya dengan pemberitaan yang dimuat *Republika* terhadap Pasangan Prabowo-Sandi yang di framing dengan berita miring terkait dugaan mahar politik cawapres Sandiaga Uno dengan PKS dan PAN. *Republika* memuat berita tersebut berulang kali yaitu pada *Republika* edisi Jumat, 10 Agustus dengan judul “PKS Berencana Laporkan Andi Arief” dan edisi Senin, 13 Agustus 2018 dengan judul “PAN Ikut Meradang”. *Republika* memuat (*Depiction*) “Jenderal Kardus” pada berita periode 10 Agustus yang berarti mudah dilipat atau dibentuk. Kata yang bernada miring tersebut ditujukan kepada Prabowo Subianto sebagai protes ketidakpuasan Andi Arief terhadap pencalonan Sandiaga Uno. Sedangkan pada edisi 13 Agustus *Republika* menggunakan kata (*Depiction*) “PAN Ikut Meradang”, kata tersebut digunakan *Republika* untuk menggambarkan reaksi dari pihak PAN yang merasa dirugikan oleh pernyataan Sekjen Partai Demokrat tersebut.

*Republika* edisi Rabu, 15 Agustus 2018 kembali memuat berita mengenai dugaan mahar politik Sandiaga Uno dengan judul “Relawan Jokowi Laporkan Sandiaga Uno”. Berita bernada miring tersebut menimbulkan (*Consequences*) bahwa adanya hubungan tidak harmonis di dalam koalisi Prabowo-Sandi, karena sebagaimana diketahui bahwa Andi Arief adalah Sekjen Partai Demokrat yang masuk dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Kemudian berita yang berjudul “Jokowi dan Prabowo Ingin Pemilu Damai” dengan menghadirkan (*Visual Image*) Foto Masing-masing pasangan calon bersama para petinggi partai koalisi. *Republika* memuat

(*Exemplars*) “Lantunan shalawat badar pun mengiringi kedatangan keduanya (Jokowi-Amin)”. Selain itu, *Republika* juga memuat (*Exemplars*) “Kedatangan mereka (Prabowo-Sandi) diiringi lantunan shalawat Nabi dengan Rebana”.

Aroma keberpihakan pemberitaan *Republika* kepada pasangan calon Jokowi-Amin semakin terasa dengan kemasan berita bernuansa religi yang sangat kental dengan kehidupan Ma'ruf Amin yang berlatar belakang santri NU, ditambah lagi dengan dimuatnya pernyataan dari kubu koalisi Jokowi-Amin yaitu Jusuf Kalla di dalam dua berita sekaligus yaitu berita berjudul “Jokowi dan Prabowo Ingin Pemilu Damai” dan berita berjudul “Kawal Pilpres Damai”. Pernyataan tersebut berbunyi “Saya yakin pemilu ini akan *soft*”. Kata *soft* tersebut menjadi (*Depiction*) bahwa pemilu presiden 2019 mendatang akan damai tanpa kekerasan.

Dari berita yang ditulis *Republika* terlihat jelas bahwa figur cawapres pada pemilu 2019 mendatang mendapat sorotan yang lebih dibandingkan pertarungan ulang antara Jokowi versus Prabowo. Hingga hari ketiga pasca pengumuman masing-masing cawapres, pemberitaan mengenai figur Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno masih berlangsung. Pada pemberitaan *Republika* yang berjudul “Kejutan Last Minutes” memuat (*Depiction*) dan (*Exemplars*). *Republika* memuat (*Depiction*) yaitu “*game changer*” yang berarti perubah alur permainan untuk menggambarkan keberadaan Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno dianggap sebagai figur yang merubah alur permainan. Sedangkan (*Exemplars*) yang dimuat *Republika* yaitu “Sebagaimana diketahui bahwa trah PDIP selalu sukses memenangkan pemilu jika

didampingi tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Gusdur-Megawati; Megawati-Hamzah Haz; Jokowi-Jusuf Kalla”. Yang artinya, posisi Ma’ruf Amin sebagai figur yang berlatar belakang Ulama NU diharapkan mampu mengulang kemenangan layaknya duet PDIP dan NU pada pilpres yang sebelumnya.

Republika juga memberitakan beberapa ulasan dipilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo, salah satunya Republika memuat (*Catchphrase*) “*Bargaining* koalisi sebagai *sweetener* (daya tarik politik) jika koalisi Gerindra-PKS-PAN tetap solid”. Kata *bargaining* dan *sweetener* di sini mengandung makna konotatif untuk menggambarkan terjadinya negosiasi politik antar partai dalam memilih figur yang akan menggantikan posisi Sandiaga Uno di kursi Jakarta II, tentu jika hubungan antara Gerindra-PAN-PKS tetap dalam jalur yang sama.

#### **Dual Fungsi Ulama pada Pilpres 2019**

Pada edisi Sabtu, 11 Agustus 2018, Republika memuat berita “Musim Semi Ulama dan Politik Indonesia” dengan dilengkapi (*Visual Images*) sketsa Kiyai bersurban dan bunga yang mekar. Ilustrasi tersebut menegaskan situasi politik yang kental dengan peran ulama. Republika menulis (*Depiction*) dan dua fakta menarik (*Exemplars*) perihal peran ulama pada pilpres 2019. Kata “Gerbong kekuatan baru” (*Depiction*) digunakan Republika untuk menjelaskan kedigdayaan ulama yang mampu mendulang suara pada pemilu mendatang. Republika juga memuat (*Exemplars*) perihal dual fungsi ulama yang merangkap sebagai umara, sebagaimana yang terjadi pada kedua kubu. Dari kubu Jokowi hadir nama Ma’ruf Amin seorang Ulama NU yang kini menjadi cawapres Jokowi. Sedangkan

dari kubu Prabowo, Republika memuat gerakan GNPF dan PA 212 yang merambah ke pilpres 2019. Misalnya, mereka mendukung tagar #2019GantiPresiden (*Catchphrase*) yang puncaknya adalah hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai Calon Presiden di pilpres 2019 mendatang.

Pemberitaan edisi Selasa, 14 Agustus 2018. Republika memuat berita dengan judul “Ulama Terjun Karena Para Politisi Gagal Menyejahterakan” dengan dilengkapi (*Visual Images*) sketsa lelaki dewasa bersorban dan seikat bunga di genggamannya. Judul berita tersebut sekaligus menjadi (*Appeals to Principle*) premis dasar dan kalim moral Republika dalam membingkai berita tentang dual fungsi ulama yang ikut memberikan pengaruh besar bahkan terjun langsung pada kontestasi politik praktis pada pilpres 2019 mendatang.

#### **Framing Jawa Pos: Drama Politik Kepentingan Parpol vs Kebutuhan Logistik**

Pada berita yang berjudul “Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik” edisi Jum’at, 10 Agustus 2018. Jawa Pos memuat beberapa hasil analisa Lely Arriane seorang Pakar Komunikasi Politik, Lulusan Doktoral Terbaik Unpad, Bandung perihal keputusan politik masing-masing kubu dalam menentukan cawapresnya. Pada paragraf kedua, Jawa Pos memuat (*Appeals to Principle*) dan (*Roots*) dengan menulis kalimat “Kepentingan partai koalisi jauh lebih dominan dari yang kita pikirkan di luar sana”. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa kepentingan partai koalisi bertengger di atas kepentingan yang lain. Karena adanya kekhawatiran jika Mahfud maju

sebagai cawapres, maka masih ada potensi untuk maju ke pilpres 2024.

Jawa Pos juga menyebut Mahfud MD sebagai “Paket Komplet” (*Depiction*) untuk menggambarkan kualitas Mahfud yang cocok sebagai cawapres Jokowi. Namun lagi-lagi demi kepentingan parpol koalisi jangka panjang, figur yang komplet tersebut tergantikan oleh figur Ma’ruf Amin. Namun, bukan berarti pilihan yang dijatuhkan kepada Ma’ruf Amin hadir tanpa alasan. Jawa Pos menulis (*Catchphrase*) bahwa “Politik identitas harus dijawab dengan identitas politik”. Artinya, ada kemungkinan politik identitas akan digunakan untuk menyerang Jokowi, maka daripada itu dipilihlah Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi untuk mengantisipasi dimainkannya politik identitas tersebut.

Lain halnya dengan berita pencawapresan Sandiaga Uno yang dianggap sebagai drama politik yang lebih hebat. Pada pemberitaannya, Jawa Pos menuliskan (*Catchphrase*) “politik itu *kan by design*, bukan *by accident*” yang berarti bahwa keputusan politik itu adalah sesuatu yang didesain atas kesepakatan dalam koalisi. Kalimat tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan politik di kubu Prabowo yang koalisinya belum seratus persen menyatakan dukungan. Sikap ketidak tegasan beberapa partai di koalisi Prabowo tersebut mengakibatkan *politic by accident* tersebut terjadi.

Jawa Pos juga memuat (*Depiction*) “Logistik itu keniscayaan”. Kata keniscayaan tersebut dalam KBBI berarti sesuatu yang mutlak. Artinya, dalam menjalankan roda politik apalagi skala pilpres tentu faktor logistik merupakan sesuatu yang sangat vital. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompromi politik

kubu Prabowo sangat membutuhkan figur yang mampu berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan logistik koalisi. Jawa Pos memuat (*Appeals to Principle*) “Di tengah partai yang *nggak* mau keluar biaya, Sandi punya”. Kalimat tersebut merupakan premis dasar yang digunakan untuk menjelaskan keputusan pencawapresan Sandiaga Uno. Di akhir berita Jawa Pos memuat (*Exemplars*) dengan menulis “jika dilihat dari sisi elektabilitas, Anies Baswedan jauh di atas Sandi dan potensi menang lebih besar jika berpasangan dengan Anies”. Namun karena alasan kebutuhan logistik, hal tersebut mampu merubah ritme politik.

Dari penjabaran di atas sekilas terlihat keberpihakan Jawa Pos kepada kubu Jokowi-Amin. Kritik yang dimuat dalam pemberitaan mengenai pencawapresan ma’ruf Amin tidak setajam kritik terhadap pencawapresan Sandiaga Uno. Ditambah lagi dengan berita berjudul “Mahfud MD Tidak Kecewa, Hanya Kaget”. Judul berita tersebut menjadi (*Exemplars*) yang memuat ketidak kecewaan Mahfud MD atas terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi. Namun, di satu sisi Jawa Pos memuat beberapa berita bernada negatif terhadap kubu Prabowo seperti pernyataan Andi Arief tentang penolakan dari Partai Demokrat terhadap pencawapresan Sandiaga Uno pada berita edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 yang berjudul “Gagal Cawapres, AHY Minta Maaf”. Jawa Pos memuat beberapa *framing devices* seperti (*Depiction*) “Jenderal Kardus” terhadap Prabowo yang diduga memberikan mahar politik senilai 500 miliar kepada Partai PKS dan PAN.

**Hoax dan Kampanye Pemilu 2019**



Isu *hoax* nampaknya mendapat sorotan tersendiri oleh Jawa Pos selama sepekan pemberitaan pasca deklarasi cawapres oleh masing-masing kubu. Pada pemberitaan edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 Jawa Pos menulis berita yang berjudul “Jargon Persatuan vs Kesejahteraan” yang dilengkapi dengan (*Visual Images*) penyerahan berkas syarat pencapresan kepada Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU. Namun yang menjadi sorotan adalah kutipan dari pernyataan M. Qodari yang dimuat Jawa Pos dengan huruf cetak tebal yang berbunyi “Yang sering mengeluarkan *hoax* akan segan dengan Ma’ruf Amin. Tantangan terbesarnya merangkul suara NU. Nilai tambah Sandi mampu berbicara isu ekonomi. Namun saya tidak yakin dia bisa merebut suara dari Indonesia Timur”. Pernyataan M. Qodari tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap Jokowi-Amin dengan memuat (*Metaphors*) figur seorang Ma’ruf Amin yang mampu menetralkan *hoax* dengan ketokohnya. Namun pada kalimat setelahnya memuat berita negatif terhadap Sandiaga Uno yang dianggap tidak mampu merebut suara dari Indonesia Timur.

Jika pada berita sebelumnya Jawa Pos memuat pernyataan yang menganggap figur Ma’ruf Amin dengan ketokohnya mampu meminimalisir *hoax*. Namun berbeda halnya dengan berita yang berjudul “*Voters* Muda, Jangan Baperan” menjelaskan bahwa di era internet dan *asymmetric information* (*Catchphrase*) sulit membedakan informasi asli atau *hoax*, hal tersebut akan berdampak terhadap kampanye politik yang akan dilakukan melalui berbagai serangan di media sosial.

Jawa Pos dalam berita berjudul “Jangan Gadaikan Persatuan” memuat berita mengenai antisipasi *hoax* yang akan terjadi

menjelang pemilu presiden 2019. Jawa Pos menuliskan (*Catchphrase*) “eskalasi politik” digunakan Jawa Pos untuk menggambarkan keadaan politik yang sedang memanas sehingga menimbulkan beragam informasi termasuk *hoax* di media sosial.

Pemberitaan edisi Minggu, 12 Agustus menurunkan dua berita yang berjudul “Aturan Kampanye di Media Sosial” dan “Hoax Marak, Gagal Bangun Komunikasi Politik Sehat”. Pada pemberitaan yang pertama, Jawa Pos memuat infografis (*Visual Images*) seorang figur sedang berorasi di podium yang lantainya diberi ilustrasi logo sosial media seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan Instagram yang menggambarkan korelasi antara kegiatan politik dan sosial media yang sangat berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi politik.

Jawa Pos edisi Senin, 13 Agustus 2018 menulis berita yang berjudul “Bentuk Tim Lawan Hoax Medsos” dengan anak judul “Strategi Kampanye Jokowi Ma’ruf”. Berita tersebut menyertakan (*Visual Images*) foto Jokowi dan Ma’ruf Amin yang menunjukkan luka bekas jarum pada lengan tangan mereka setelah pengambilan sampel darah dalam tes kesehatan. Pada awal pemberitaan dituliskan (*Exemplars*) “struktur organisasi tim kampanye nasional Jokowi Ma’ruf. Mulai dari sekretaris, bendahara, *command and control room* dan juru bicara yang totalnya berjumlah 250 orang”. Di akhir pemberitaan, Jawa Pos juga memuat (*Exemplars*) yang bersumber dari Sandiaga Uno “pembentukan tim kampanye Prabowo-Sandi masih dalam proses penyusunan yang melibatkan empat partai pengusung”.

Pada pemberitaan edisi Selasa, 14 Agustus 2018, Jawa Pos menulis berita berjudul

“Janji Transparan Dana Kampanye” dengan anak judul “Pastikan SBY Bukan Ketua Tim Sukses”. Isu kemungkinan SBY menjadi ketua tim pemenang pada pemberitaan Jawa Pos di hari sebelumnya terbantahkan oleh anak judul berita pada hari setelahnya. Pemberitaan tersebut dilengkapi (*Visual Images*) foto pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, Jawa Pos juga memuat tuntutan Zon terhadap paslon Jokowi-Amin agar transparan terkait dana kampanye dengan memuat (*Depiction*) “Kami tidak ingin ada dana siluman, semua lebih baik terbuka”. Terdapat kalimat “dana siluman” pada pernyataan tersebut yang menggambarkan dugaan adanya sumber pendanaan kampanye yang tidak jelas asal usulnya. Pemberitaan Jawa Pos memuat beberapa (*Exemplars*) mengenai pembentukan tim pemenang yang belum terselesaikan dan masih berada di tahap pembentukan kerangka tim. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat kontras mengingat pada sehari sebelumnya Jawa Pos dengan detil menuliskan berita mengenai pembentukan tim kampanye kubu Jokowi-Amin yang sudah selesai dari tingkat nasional hingga daerah sedangkan dari kubu Prabowo-Sandi masih dalam tahap penyusunan kerangka tim pemenang.

#### **Framing Kompas: Keputusan Politik Pragmatis di Detik-detik Terakhir**

Pada pemberitaan edisi Jumat, 10 Agustus 2018 Kompas memuat berita deklarasi capres-cawapres dengan menerjunkan berita yang berjudul “Dinamika Terakhir Menjadi Penentu” dengan dilengkapi (*Visual Images*) deklarasi Jokowi dan Prabowo yang dihadiri oleh beberapa petinggi partai masing-masing. Kompas memuat (*Metaphors*) “keputusan kedua

kubu dalam menentukan cawapresnya menunjukkan praktik politik di Indonesia yang cenderung pragmatis”. Kata “pragmatis” digunakan Kompas untuk menggambarkan keputusan pada kedua kubu dalam menentukan figur cawapres masing-masing.

Kompas membagi pemberitaannya menjadi dua (*Depiction*) “Menerima” dan “Mundur” yang ditulis dengan font *Bold* (tebal). Kata “Menerima” tersebut ditulis untuk menjelaskan ketidak kecewaan Mahfud MD yang gagal bersanding bersama Jokowi dan menerima dengan lapang dada keputusan Jokowi memilih Ma’ruf Amin. Sedangkan kata “Mundur” ditulis untuk menggambarkan sikap Sandiaga Uno yang harus melepaskan Jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra agar bisa maju sebagai cawapres Prabowo melalui jalur Independen.

Kompas memuat (*Exemplars*) perihal Partai demokrat yang belum menentukan arah koalisi dengan menulis “Partai Demokrat menjadi satu-satunya parpol pemilik kursi di DPR yang hingga semalam (Kamis 9 Agustus 2018) pukul 23:45 belum menyatakan dukungannya di pilpres”. Kompas memuat (*Metaphors*) yang bersumber dari Sekjen PKB Abdul Karding yang mengatakan “Kombinasi kepemimpinan Nasionalis dan Religius” sebagai deskripsi duet Jokowi dan Ma’ruf Amin. Kompas menganggap Ma’ruf Amin sebagai figur yang melengkapi Jokowi dengan menulis (*Depiction*) “Ma’ruf Amin mampu menambal apa yang dipersepsikan publik selama ini jauh dari pak Jokowi”. Kata “menambal” tersebut digunakan Kompas untuk menggambarkan figur Ma’ruf Amin yang akan meruntuhkan stigma

publik tentang Jokowi yang anti Islam, PKI dan lain-lain.

Pada rubrik Politik & Hukum, Kompas menyertakan infografis mengenai riwayat hidup kedua pasangan calon yang diberi judul “Kontestasi Menuju Pilpres 2019 Dimulai” dengan dilengkapi (*Visual Images*) foto kedua pasangan calon di posisi kiri Jokowi-Amin sedangkan Prabowo-Sandi di posisi kanan dengan ditengahi simbol Negara Republik Indonesia yaitu simbol garuda.

Dalam berita yang berjudul “Pemilu Presiden Elitis” Kompas menulis beberapa perangkat framing seperti (*Depiction, metaphors* dan *Catchphrase*) untuk menjelaskan keputusan politik pragmatis tersebut. Di awal berita, Kompas menulis (*Depiction*) “*power sharing*” yang bermakna pembagian kursi kabinet. Kata tersebut digunakan Kompas untuk menunjukkan dampak dari keputusan politik pragmatis. Terdapat (*Metaphors*) “matematika politik” yang menunjukkan keputusan politik yang berfokus kepada kepentingan elite politik yang cenderung menganak tirikan kepentingan masyarakat. Di akhir berita, Kompas menutup pemberitaannya dengan memuat (*Catchphrase*) sekaligus menjadi (*Consequences*) mengutip intelektual Amerika, James Clarke yang mengatakan “seorang politisi berpikir tentang pemilihan ketika seorang negarawan berfikir tentang generasi masa depan”. Frasa yang menarik tersebut menjadi (*Appeals to Principle*) bahwa realitas politik masa kini masih didominasi oleh politisi namun miskin negarawan.

Pada pemberitaan edisi Sabtu, 11 Agustus 2018, Kompas memuat *headline* dengan judul “Semua Kandidat Dorong Pemilu Damai” dengan memuat (*Visual Images*) Joko

Widodo dan Prabowo Subianto yang melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Kompas nampaknya ingin memperlihatkan keberimbangan informasi, terlihat dari foto pada beritanya mengandung komparasi yang sepadan antara kubu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi. Kompas juga memuat beberapa (*Exemplar*) yang tidak menonjolkan salah satu kubu saja. Contoh, pada paragraf pertama di awal pemberitaan Kompas menulis (*Exemplars*) “Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan pesan yang sama yaitu agar kontestasi elektoral berlangsung damai”. Pada sub judul “Demokrasi” Kompas juga memuat (*Exemplars*) “Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin jadi pendaftar pertama yang mendatangi KPU. Mereka hadir sebelum shalat jum’at dengan didampingi pimpinan tujuh partai politik (parpol) pengusung”. Pada paragraf selanjutnya dimuat juga (*Exemplars*) “Sekitar tiga jam kemudian, setelah shalat jum’at, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga mendaftar disertai empat pimpinan parpol pengusung”.

Pada sub judul “Tantangan Ekonomi” Kompas juga menghadirkan komparasi dari cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno dengan menuliskan (*Eksemplars*) sebagai berikut “Sandiaga menyampaikan, dirinya dan Prabowo akan berjuang menghadirkan pertumbuhan dan pembaruan dalam sistem ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya”. Sementara itu pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin “berjanji akan memperkuat ekonomi umat apabila terpilih pada pilpres 2019”.

Pada rubrik Politik & Hukum Kompas memuat berita “Politik Tikungan Terakhir”

dengan memuat beberapa (*metaphors, depiction* dan *appeals to principles*). Pada bagian judul, Kompas memuat (*Depiction*) “Politik Tikungan Terakhir”. Pada awal pemberitaannya, Kompas memuat perumpamaan (*Metaphors*) bahwa “Politik itu mirip MotoGP. Tikungan terakhir menentukan hasil akhir. Valentino Rossi dan Marc Marquez sering membuat kejutan di tikungan terakhir”. Kompas mengumpamakan posisi Ma’ruf Amin dan Mahfud MD seperti persaingan antara Valentino Rossi yang bermanuver memotong jalur Marc Marquez dan Rossi keluar sebagai juara pada perhelatan MotoGP di Sirkuit Assen 2015. Hal tersebut menjadi premis dasar (*Appeals to Principle*) mengapa keputusan yang terkesan praktis pada detik-detik akhir tersebut membuat nama Ma’ruf Amin yang keluar dari saku Jokowi.

Sedangkan politik tikungan terakhir di kubu Prabowo dimuat Kompas dengan menulis (*Exemplars*) bahwa Prabowo mendapat tekanan dari beberapa parpol anggota koalisi yang ngotot agar kader mereka dijadikan cawapres Prabowo. Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satu nama yang disodorkan Demokrat sebagai cawapres. Begitu juga dari hasil ijtima’ ulama yang mengerucutkan nama Salim Segaf al-jufri dan Ust. Abdul Somad yang diusung sebagai cawapres Prabowo. Dalam situasi sulit ini, figur Sandiaga Uno muncul dan menyalip ketiga nama yang sebelumnya sangat santer terdengar menjadi cawapres Prabowo.

Kompas juga memuat berita kekecewaan Demokrat dengan menuliskan (*Depiction*) “Partai Demokrat meradang karena terkena PHP”. Kompas menggunakan kata “meradang” dan “PHP” untuk menjelaskan kekecewaan Demokrat atas keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres.

Kompas juga memuat cuitan Andi Arief yang mengatakan (*Metaphors*) “Prabowo Jenderal Kardus”. Di akhir pemberitaannya, Kompas memuat (*Catchphrase*) bahwa “Politik itu drama dan akrobatik. Seperti es batu, politik itu tidak bisa beku selamanya”. Frasa tersebut digunakan Kompas untuk menggambarkan situasi politik pada kedua kubu yang penuh dengan dinamika dan menjelaskan keputusan politik di detik-detik akhir merubah semua ritme yang terbentuk sebelumnya.

### **Efek Ekor Jas (Coat Tail Effect) Pemilu 2019**

Kompas edisi Jumat, 10 Agustus 2018 dan edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 menerbitkan berita dengan judul “Strategi Para Pemburu Efek Ekor Jas” dengan menampilkan (*Visual Images*) foto kedua pasangan capres-cawapres yang sedang mendaftarkan diri sebagai di kantor KPU dengan didampingi para petinggi partai politik pendukung. Pada pemberitaannya, Kompas membuat judul yang cukup menarik dengan menggunakan (*Metaphors* dan *Depiction*) yaitu “Strategi Para Pemburu Efek Ekor Jas”. (*Metaphors*) “para pemburu” tersebut digunakan Kompas untuk menggambarkan partai politik pendukung capres-cawapres kedua kubu yang mencari keuntungan dari figur kedua pasangan tersebut. Sedangkan (*Depiction*) “Efek Ekor Jas” adalah leksikon yang digunakan Kompas untuk menggambarkan incaran para pemburu yaitu memperoleh hubungan yang positif antara kekuatan elektoral capres atau cawapres terhadap parpol pendukung. Hal tersebut membuat parpol pengusung berharap agar figur capres-cawapres yang mereka dukung mampu mengamankan perolehan elektoral partai pada pemilu legislatif.

Menurut Kompas, efek ekor jas Partai PPP dan PKB dapat diperoleh dari kehadiran

sosok Ma'ruf Amin yang dulu pernah menjabat sebagai DPR dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PPP dan memiliki kedekatan dengan PKB. Kompas juga memuat pernyataan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus yang mengatakan "Kami sedang bermain di medan baru". Pernyataan Sekjen Golkar tersebut mengandung perangkat (*Metaphors*) yang mendeskripsikan pemilu serentak ini sebagai "medan baru" sehingga harus memikirkan agar efek ekor jas pemilu tersebut sampai kepada Partai Golkar. Oleh karena itu citra Golkar selalu didekatkan dengan sosok Jokowi dan Ma'ruf Amin melalui berbagai alat peraga kampanye.

Sedangkan dari Kubu oposisi Prabowo-Sandi, Kompas menilai bahwa efek ekor jas tersebut berpotensi menguntungkan Gerindra. Kompas memuat (*Roots*) "Jika mengacu pada teori efek ekor jas, kondisi ini berpotensi banyak menguntungkan Gerindra. Ini karena Prabowo dan Sandiaga sama-sama berasal dari Gerindra meski saat ini Sandiaga telah mundur dari partai". Namun isu efek ekor jas yang menguntungkan Gerindra tersebut terpatahkan dengan sikap Sandiaga Uno untuk mundur dari Gerindra yang mana adalah salah satu bagian dari kesepakatan PAN. Artinya efek ekor jas pemilu masih bisa mengalir ke parpol pengusung lain seperti PKS, PAN dan Demokrat.

Pada pemberitaan edisi Minggu, 13 Agustus 2018. Kompas menulis berita dengan judul "Menakar Dampak Efek Ekor Jas" dengan memuat (Visual Images) foto konferensi pers kedua capres-cawapres yang dihadiri seluruh petinggi parpol pendukung. Kompas menulis pemberitaan mengenai efek ekor jas pada pemilu 2019 dengan memuat (*Exemplars*) pernyataan Koordinator Program Tata Kelola

Pemilu Universitas Sam Ratulangi, Manado, Ferry Daud. Ferry mengatakan bahwa efek ekor jas tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan elektoral pada pileg karena pemilih cenderung memilih figur caleg bukan partai politik. Alasan lain bahwa efek ekor jas tersebut tidak terlalu berpengaruh adalah kandidat capres-cawapres itu diusung oleh koalisi. Jika setiap parpol mengusung capres-cawapres baru efek ekor jas akan berpengaruh.

Di akhir pemberitaan Kompas memuat (*Appeals to Principle*) bahwa efek ekor jas akan terasa pada pemilu 2019, namun belum bisa memperkirakan dampaknya. Mengingat pemilu serentak antara pilpres dan pileg adalah untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Kompas juga memuat perkiraan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga yang memperkirakan di kubu Prabowo-Sandi Partai Gerindra akan menikmati dampak paling besar efek ekor jas dari Prabowo. Sedangkan di kubu Jokowi-Amin PDIP di anggap partai yang menikmati dampak paling besar efek ekor jas dari Jokowi.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Berita**

Dari lima faktor yang mempengaruhi peningkatan berita menurut J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam (Krisdinanto, 2014 : 8) , terdapat dua faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembuatan berita Republika, Jawa Pos dan Kompas yaitu (*extramedia level*) meliputi pemerintah dan narasumber serta (*ideology level*).

Tentu perkembangan pers pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh sistem pers yang diatur sedemikian rupa oleh sistem politik pemerintahan yang berlaku (Hutagalung, 2013 : 54). Mengenai masalah sistem pemerintahan, Surat Kabar Kompas, Jawa Pos

dan Republika adalah beberapa contoh surat kabar yang tidak terlepas dari belenggu SIUPP pada masa Orde Baru.

Sebagai contoh, jurnalisme kepingin adalah julukan yang disematkan oleh Rosihan Anwar terhadap gaya pemberitaan Kompas tidak terlalu frontal mengkritisi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tekanan yang dilakukan pemerintah terhadap pers (Hutagalung, 2016 : 4). Jawa Pos sebagai surat kabar yang ingin bangkit dari keterpurukan mau tidak mau harus mengatur porsi informasi bermuatan politik pemerintahan di dalam pemberitaannya dan mengalokasikan berita seputar olahraga terutama berita sepakbola (Junaedi, dkk, 2017 : 124). Sedangkan Republika harus mendirikan PT. Abdi Bangsa yang dibidani ICMI agar bisa mendapatkan SIUPP dari rezim penguasa. (Hill, 2011 : 155). Namun setelah munculnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers nasional, media dewasa ini bisa bebas memilih topik pemberitaan yang lebih beragam serta kewenangan media untuk memihak ada sepenuhnya ditangan media itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah (Poti, 2011 : 19).

Selain itu, faktor di luar institusi media lainnya yaitu pemilihan narasumber. Republika condong menggunakan narasumber yang berasal dari kubu Jokowi-Amin. Pemberitaan yang dimuat Republika lebih banyak dialokasikan untuk memuat hal positif dari kubu Jokowi-Amin yang diperkuat oleh argumen narasumber yang berasal dari koalisi mereka. Sedangkan pemberitaan mengenai koalisi Prabowo-Sandi mendapat ruang lebih sempit yang berdampak kepada narasumber yang dihadirkan pun tidak banyak.

Sedangkan paada pemberitaan Jawa Pos yang berjudul “Kepentingan Parpol dan Kepentingan Logistik” menggunakan pakar komunikasi politik Universitas Padjajaran yaitu Lely Arriane. Kritik yang disampaikan oleh Lely Arriane kepada kedua kubu koalisi dalam koran Jawa Pos cukup tajam. Selain Lely, Jawa Pos juga menghadirkan Kepala Program International Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dias Satria sebagai Narasumber pemberitaannya yang berjudul “Voters Muda Jangan Baperan”.

Kedua SKH di atas berbeda dengan Kompas yang pemberitaannya konsisten menghadirkan narasumber yang beragam sebagai usaha untuk menjaga netralitas berita. Dalam hal ini, Kompas menggunakan narasumber dari kalangan koalisi Jokowi-Amin, Prabowo-Sandi dan para pakar yang sesuai dengan tema berita. Contoh dalam pemberitaan edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 yang berjudul “Semua Kandidat Dorong Pemilu Damai” menggunakan narasumber dari kedua kubu, dan beberapa pakar. Mereka antara lain, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Arif Budiman (Ketua KPU), Aviliani *Senior Institute For Develovement of Economics and Finances* (INDEF), dan Ninasapti Triaswati Dosen Ekonomi Pembangunan UI.

Perbedaan ideologi yang dianut oleh masing-masing media juga berpengaruh terhadap pengemasan isi dari berita. Republika yang hadir dengan ideologi kebangsaan, kerakyatan dan keislamannya menyajikan berita yang kental dengan gaya islami dengan wajah yang moderat (Romadhonita, 2014 : 282). Satu hal yang menjadi titik fokus pemberitaan Republika mengenai konstelasi pilpres 2019

adalah dual fungsi ulama sebagai tokoh agama yang juga merangkap sebagai umara.

Ideologi Jawa Pos yang memilih jalan kapitalis alias mengikuti kemauan pasar memframing kontestasi demokrasi pilpres 2019 dari sudut pandang yang berbeda (Romadhonita, 2014 : 282). Sebagaimana yang dapat kita jumpai di sepanjang pemberitaan periode 10-16 Agustus 2018, Jawa Pos membuat judul berita yang menarik dan mengundang minat baca. Contoh, Jawa Pos menulis berita berjudul pengumuman cawapres penuh drama, kepentingan parpol vs kebutuhan Logistik, voters muda jangan baperan, dan lain-lain.

Sedangkan Kompas yang beriman kepada (Humanisme transendental) mengarahkan fokus pemberitaan kepada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok tertentu. Maka dalam setiap pemberitaannya Kompas biasanya menggunakan kata yang lentur dan tidak frontal (Wulandari, 2012 : 154). Perangkat framing yang dimuat oleh Kompas seperti *Visual Images*, *matapors* *catchprase* dan lain-lain berusaha ditampilkan seobjektif mungkin.

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa perbedaan pada *frame* yang dimuat oleh Surat Kabar Harian Republika, Jawa Pos dan Kompas terkait pemberitaan pilpres 2019. Sejak awal pemberitaan yang dimuat Republika, ia menitik beratkan pemberitaan kepada figur cwapres dari Jokowi dan Prabowo. Berita bernada positif selalu didengungkan oleh Republika, ia menganggap duet Jokowi-Amin adalah komposisi yang pas (*Metaphors*) “Nasionalis-Religius”. Sebaliknya, *framing* Republika terkait pencawapresan Sandiaga Uno tidak sebaik Ma’ruf Amin, Republika memuat

(*Exemplars*) yang bernada negatif mengenai dugaan kasus mahar politik Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Republika juga menyorot keterlibatan intens ulama NU dalam kubu Jokowi-Amin serta ulama GNPF dan PA 212 di kubu Prabowo-Sandi.

Sedangkan Jawa Pos menghadirkan berita dari aspek politisnya, sebagaimana yang diangkat dalam berita “Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik”. Jawa Pos memuat (*Exemplar*) adanya penolakan dari parpol pendukung Jokowi terhadap figur Mahfud MD sebagai cawapres. Jawa Pos memuat (*Catchprase*) “di tengah partai yang *nggak* mau keluar biaya, Sandi punya” hal tersebut ditulis untuk menjelaskan kondisi koalisi Prabowo-Sandi. Menurut Jawa Pos *hoax* menjadi salah satu momok yang menakutkan dalam perhelatan politik. Salah satu penyebabnya menurut Jawa Pos adalah arus informasi yang begitu deras atau disebut “*asymmetric information era*”.

Sedangkan Kompas, memandang konstelasi politik 2019 ini sebagai suatu pembelajaran yang bisa diteliti lebih dalam lagi. Karena pemilu 2019 pertama kalinya pilpres dan pileg dilakukan secara serentak. Itulah sebab mengapa Kompas meneliti lebih dalam apakah “Dampak Ekor Jas” dari figur capres-cawapres mampu memberikan dampak terhadap perolehan elektoral partai pada pemilu legislatif. Kompas juga memuat pemberitaan yang menunjukkan praktik politik di Indonesia cenderung pragmatis karena mengedepankan hitungan matematika politik jangka panjang yang terkesan mengesampingkan kepentingan utama yakni kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Faktor extramedia dan faktor Ideologi adalah dua dari lima faktor yang mempengaruhi

pembingkai berita pada ketiga koran tersebut. Republika terlihat memihak kepada kubu Jokowi-Amin dalam hal pemilihan narasumber dalam berita, hal tersebut sangat jelas terlihat dari beberapa narasumber yang mayoritas dihadirkan dari beberapa petinggi partai koalisi Jokowi-Amin. Sesekali juga Republika menghadirkan narasumber dari pakar serta pengamat politik islam dan beberapa perangkat pemerintahan seperti KPU dan Bawaslu.

Jawa Pos tidak jauh berbeda dari Republika dalam pemilihan narasumber, beberapa narasumber yang digunakan Jawa Pos masih didominasi oleh para petinggi partai koalisi Jokowi-Amin. Sedangkan untuk beberapa berita yang mengkritisi kedua kubu Jawa Pos juga menggunakan narasumber yang kredibel pada bidangnya, seperti pada pemberitaan yang berjudul “Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik”, Jawa Pos menggunakan Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran yaitu Ibu Lely Arrianie. Dalam pemberitaan mengenai maraknya *hoax* menjelang pemilu, Jawa Pos menggunakan narasumber yang bertaji dibidangnya seperti jajaran Polri dan *Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy & Integrity (PADI)* M. Zuhdan.

Kompas tidak berpola dan tidak serta merta condong kepada satu pihak saja. Kompas menghadirkan narasumber yang beragam dari berbagai kalangan. Uniknya, pada pemberitaan mengenai dampak ekor jas pemilu 2019, Kompas juga mengutip beberapa hasil penelitian dalam jurnal tentang dampak ekor jas pemilu yang bisa menjadi bahan untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak ekor jas pemilu di Indonesia.

Dari sisi pemerintahan, ketiga media tersebut sedikit tidak sudah pernah sama-sama berangkat dari otoritarian menuju libertarian dan saat ini menginjak kebebasan pers yang bertanggungjawab. Perbedaan ini terasa dari sisi bagaimana media dewasa ini bebas untuk berpendapat. Contoh, kritik pedas yang dilontarkan Jawa Pos dan Kompas kepada kedua kubu yang tidak sepenuhnya berdemokrasi untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan politik jangka panjang dari masing-masing partai koalisi.

Faktor yang mempengaruhi pembingkai berita selanjutnya yaitu faktor ideologi. Republika yang berideologikan islam yang moderat, mengulas dinamika kontestasi pilpres tersebut dari sudut keterlibatan ulama dalam pemilu presiden 2019 yang bahwasanya ulama terjun ke ranah politik karena selama ini politisi gagal menyejahterakan rakyatnya.

Sedangkan Jawa Pos yang beriman kepada kapitalis. Jawa Pos membingkai pemberitaan pilpres 2019 ini menjadi informasi semenarik mungkin untuk dinikmati para pembacanya. Bahasan yang kritis, pemilihan isu dan ilustrasi yang unik ditunjukkan oleh Jawa Pos untuk menarik minat pembacanya. Namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kualitas pemberitaan yang dihasilkan oleh Jawa Pos.

Lain halnya dengan Kompas yang berideologikan kemanusiaan transendental mengulas pemberitaan pilpres tersebut dengan sopan dan menghindari konfrontasi berita. Kompas berusaha menghadirkan informasi yang berimbang, hal tersebut tercermin dari beberapa ilustrasi atau *visual images*, penulisan judul berita dan pemilihan narasumber yang beragam. Di samping itu, Kompas memuat pemberitaan



mengenai dampak ekor jas pemilu 2019. Mengingat pilpres kali ini dilakukan bersamaan dengan pileg. Kompas menghadirkan pemberitaan politik yang mendidik dan mencerahkan bagi masyarakat, politisi, pengamat politik dan bagi siapa saja yang tertarik menggeluti bidang tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: LSPP
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Interaksi*. Vol.2, No.2. Hal 53-60
- Jati, W. R. (2013). Politik Persuasif Media: Peran Media dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.10, No.2. Hal 15
- Junaedi, Fajar, dkk (2017). Relasi Bonek dan Jawa Pos dalam Perspektif Strukturasi. *Jurnal Komunikator*. Vol. 9. No. 2. Hal 124
- Krisdinanto, N. (2014). Anomali dan Teori Hirarki Pengaruh terhadap Isi Media. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*. Vol.3, No.1. Hal 8
- Kuncoro, W. (2013). Eksistensi Ruang Publik di Media Cetak: Studi Kasus Jawa Pos, Surya, dan Surabaya Pos. *Jurnal Komunikasi Islam*. Vol.3, No.2. Hal 227
- Lubis, K. H. (2011). Kompensasi Wartawan dan Independensi (Studi Deskriptif tentang Peranan Kompensasi Wartawan terhadap Independensi Anggota Aliansi Jurnalis Independen Cabang Medan)
- Romadhonita, P. (2014). Analisis Framing Berita Capres dan Cawapres pada Pemilu 2014 di Harian Republika dan Jawa Pos. *Jurnal Commonline Departemen Komunikasi*. Vol.4, No.1. Hal 283
- Sutanto, M. H. (2014). Propaganda Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019 (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2014 pada Harian Kompas Edisi 4 Juni 2014). *Jurnal HUMANITY*. Vol.9. No.2. hal 39
- Wicaksono, A. P, dkk. (2015). *Media Terpenjara: Bayang-bayang Pemilik dalam Pemberitaan Pemilu 2014*. Yogyakarta: Yayasan TIFA
- Wulandari, Yosi. (2012). Pendayagunaan Struktur Teks Wacana Kesejahteraan Rakyat Dalam Tajuk Rencana Harian Kompas. *Kajian Linguistik dan Sastra*. Vol. 24. No. 2. Hal 152-163

